



**PERUBAHAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP NELAYAN DAN
PENGARUHNYA TERHADAP AKTIVITAS KENELAYANAN DI
KABUPATEN CILACAP, TAHUN 1970-1985**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1
dalam Ilmu Sejarah

Disusun oleh:

Ruslan Abdul Gani
13030113120010

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Ruslan Abdul Gani, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 24 Juni 2020
Penulis,

Ruslan Abdul Gani
13030113120010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

***"BERTOLAKLAH KE TEMPAT YANG DALAM DAN TEBARKANLAH JALAMU
UNTUK MENANGKAP IKAN"***

LUKAS 5;1-11

Dipersembahkan untuk:

BAPAK&IBU KU

Disetujui,
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Sutejo K. Widodo., M.Si.

NIP 196005151985031004

Diterima dan disahkan oleh
Panitia Ujian Skripsi Program Strata-1
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Diponegoro
Pada hari : Kamis
Tanggal : 24 Juni 2020

Ketua,



Prof. Dr. Singgih Tri S., M.Hum.
NIP 196406261989031003

Anggota I,



Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si.
NIP 196005151985031004

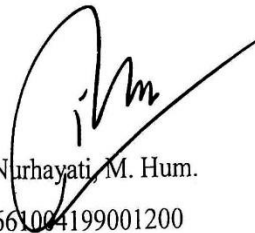
Anggota II,



Dr. Indriyanto, S.H., M.Hum.
NIP 196407111990011001

Mengesahkan,

Dekan



Dr. Nurhayati, M. Hum.
19661004199001200

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlawanan Nelayan Tradisional di Kabupaten Cilacap Tahun 1971-1985”. Selain didasarkan pada pentingnya penulisan sejarah nelayan, pemilihan tema ini juga dilakukan karena kedekatan emosional penulis terhadap dunia maritim. Selain itu, penulis adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan sejarah, penulis juga merupakan anggota kelompok belajar dunia maritim yang tergabung dalam Maritime Study Group (MSG). lebih lanjut, skripsi ini disusun untuk menempuh ujian akhir program Strata-I pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih atas bantuan, bimbingan, dan petunjuk, baik berupa material maupun spiritual kepada yang terhormat: Dr. Nurhayati, M. Hum., selaku dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respatih Puguh, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang berkenan memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Sutejo K. Widodo., M. Si., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bekal keilmuan, pengarahan, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada Dra. Sri Indrahti, M. Hum., selaku dosen wali, yang dengan sabar memberikan perhatian terhadap perkembangan akademik penulis. Terimakasih juga penulis haturkan kepada segenap dosen penguji: Prof. Dr. Singgih Tri S., M. Hum., Prof. Dr. Sutejo K. Widodo., M.Si., Dr. Indriyanto., S.H., M. Hum., Dra. Sri Indrahti, M. Hum., yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun bagi skripsi ini.

Terimakasih penulis haturkan kepada segenap pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Terimakasih juga

penulis haturkan untuk segenap staf administrasi Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memeberikan pelayanan yang maksimal. Secara khusus penulis menghaturkan termakasih kepada Siti Julaeha, Muhammad Agung Saeputro, Farid Fardon Tayeb, dan Reza Jurnaliston yang telah menjadi teman diskusi dengan pemikiran-pemikiran yang aktual. Serta kepada Adikaresta Abdillah Aziz, Murni Anggraeni, dan Muzamil atas pinjaman koleksi buku-bukunya yang berkaitan dengan tema skripsi ini sungguh menjadi sumbangan yang tidak ternilai harganya.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yang hebat, kakak-kakak, serta sepupuh-sepupuh penulis yang telah memberikan bantuan materi, moral, maupun spiritual sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada para sahabat di Jurusan Sejarah, Suhardinata “Ardi”, Zikri Aulia “Bokir”, Ribud Harianto “Anto”, Zeza Ardana, Agung Saeputro, Dimas Prayogo “Depe”, Farid F Tayeb “Adon”, Reza Jurnaliston, Peni Suwito, Rizki Februari “Pepi”, dan Eko WR, serta teman-teman Jurusan Sejarah lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas kebersamaannya selama ini.

Skripsi ini pada hakekatnya masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan baik dalam hal tata tulis maupun substansi, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Meski sedikit, semoga skripsi ini dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 24 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR ISTILAH	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN	xvi
SUMMARY	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II	
GAMBARAN UMUM KABUPATEN CILACAP	22
A. Kondisi Geografis	22
B. Kondisi Sosial-Ekonomis	26
C. Tradisi Masyarakat di Kabupaten Cilacap	33
1. Tradisi Jumat <i>Kliwonan</i>	
2. Upacara Adat Sedekah Laut	33
3. Upacara Begalan	34
	37
BAB III	
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI	
PENANGKAPAN IKAN DI KABUPATEN	
CILACAP	39
A. Penggunaan Teknologi Tradisional	40
1. Teknologi Tradisional	43
2. Jumlah Produksi Penangkapan Ikan	53

	B. Perubahan Teknologi Penangkapan Ikan	56
	1. Bantuan Kredit	58
	2. Kehadiran Nelayan Pendetang	60
BAB IV	PENGARUH PERUBAHAN ALAT TANGKAP IKAN BAGI NELAYAN DI KABUPATEN CILACAP	70
	A. Perbedaan Produksi Penangkapan	71
	B. Pelanggaran Jalur Penangkapan	75
	C. Konflik Antar Kelompok Nelayan	82
	D. Penghapusan Jaring <i>Trawl</i>	92
	E. Dampak Penghapusan Jaring <i>Trawl</i>	95
BAB V	SIMPULAN	101
	DAFTAR PUSTAKA	102
	DAFTAR INFORMAN	107
	LAMPIRAN	108

DAFTAR SINGKATAN

AIRUD	: Perairan dan Udara
ANRI	: Arsip Nasional Republik Indonesia
ABK	: Anak Buah Kapal
DKP	: Departemen Kelautan dan Perikanan
D.K	: Daya Kuda
G.T	: <i>Grosstonase</i>
HNSI	: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
IKPI	: Induk Koperasi Perikanan Indonesia
KUD	: Koperasi Unit Desa
KAMLA	: Keamanan Laut
KM	: Kapal Motor
Keppres	: Keputusan Presiden
KK	: Kepala Keluarga
Kg	: Kilogram
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LP	: Lembaga Pemasyarakata
MSY	: <i>Maximum Sustainable Yield</i>
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
MSG	: Maritime Study Group
MENTAN	: Menteri Pertanian
PELITA	: Pembangunan Lima Tahun
PERPUSNAS	: Perpustakaan Nasional
REPELITA	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
SIUP	: Surat Ijin Usaha Perikanan
SIKP	: Surat Ijin Kapal Perikanan
SK	: Surat Keputusan

TPI : Tempat Pelelangan Ikan
PK (Paardenkracht) : Tenaga Kuda
UGAS KAMLA : Unsur Tugas Keamanan Laut
ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif

DAFTAR ISTILAH

- Ancak* : Alat yang terbuat dari belahan bambu dan dianyam sehingga membentuk persegi empat yang biasa digunakan sebagai tempat atau alas membawa sesaji.
- Andang-andang* : Bambu yang letaknya melintang dari tiang layar sampai di atas sanggan layar.
- Begalan/begal* : Perampasan atau perampokan di tengah jalan.
- Buttom-up* : Perencanaan pembangunan dimana masyarakat lebih berperan dalam memberikan gagasan dari awal hingga pelaksanaan evaluasi.
- Blue Revolution* : Sebuah istilah untuk menggambarkan modernisasi dalam dunia perikanan.
- Cadik/Katir* : Alat keseimbangan pada perahu yang terbuat dari bambu dan kayu.
- Cai* : Dalam Bahasa Sunda berarti air.
- Fishing ground* : Suatu daerah perairan dimana ikan yang menjadi sasaran penangkapan tertangkap dalam jumlah yang maksimal dan alat tangkap dapat dioperasikan secara teknis serta ekonomis.
- Giantwall* : Tembok/tanggul raksasa yang biasa digunakan untuk memecah/menghadang gelombang air laut.
- Green Revolution* : Sebuah istilah untuk menggambarkan modernisasi dalam dunia Pertanian.
- Grosstonase* : Volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan ruang tertutup yang terletak di atas geladak di tambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.
- Jodhang* : Alat yang terbuat dari kayu dan dibentuk persegi panjang yang biasa di gunakan untuk mengangkat sesaji yang akan di bawa ke laut.
- Joli/Usungan* : Sebuah tandu yang biasanya tertutup atau bertirai untuk mengusung raja dan putri-putri keraton.
- Kendhil* : Tempat untuk menyimpan air yang terbuat dari tanah liat.
- Kliwonan* : Kebiasaan masyarakat atau kelompok umat islam khususnya, mengunjungi makam orang yang dikeramatkan dengan aksud ziarah pada setiap malam jum'at kliwon.
- Kuwali* : Atal masak yang terbuat dari baja atau logam lain yang diletakkan di atas kompor dan digunakan sebagai wadah makanan yang akan diolah.
- Local Wisdom* : Semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman,

	: atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntut perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.
Motorisasi	: Pengubahan sesuatu yang tidak menggunakan motor menjadi bermotor.
Modernisasi	: Bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang kearah yang lebih baik dengan harapan akan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur.
Paceklik	: Musim kekurangan bahan makanan atau musim nelayan tidak melaut.
Sanggan Layar	: Tempat meletakkan layar yang digulung.
<i>Siwur</i>	: Alat yang digunakan untuk mengambil air biasanya dibuat dari bahan tempurung kelapa yang diberi pegangan bambu.
<i>Stakeholder</i>	: Suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
<i>Tai Kong</i>	: Seorang juru mudi kapal <i>trawl</i>
<i>Tampah</i>	: Alat yang terbuat dari anyaman bambu, digunakan untuk membersihkan beras.
<i>Takir</i>	Alat yang terbuat dari daun pisang dan diujungnya diberikan semacam janur atau daun nyiur muda.
Tirakat/Tirakatan	: Upaya untuk memperdalam doa atau mantra, dalam hal ini adalah proses mengasah doa sehingga mendapatkan kejernihan batin dan pencapaian ilmu seperti yang diharapkan.
<i>Trawl</i>	: Jaring kantong yang ditarik di belakang kapal.
Udang <i>Jerbung</i>	: Jenis udang <i>Penaeid</i> atau <i>Penaeus Marguinesis</i> yang banyak terdapat diperairan Cilacap dan hidup pada kedalaman 15-40 meter.
<i>Ubarampe</i>	: Segala keperluan yang harus disediakan dalam suatu upacara ritual.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar:	
2.1 Peta Wilayah Kabupaten Cilacap.	22
3.1 Ilustrasi perahu jenis <i>jukung</i> .	45
3.2 Ilustrasi perahu jenis <i>payang</i> .	47
3.3 Contoh jenis Perahu <i>Compreng</i> .	48
3.4 Keluarga nelayan yang berasal dari bagan Siapi-api.	61
3.5 Ilustrasi Jaring Trawl.	63

DAFTAR GRAFIK

Grafik		Halaman
3.1	Jumlah Produksi Ikan dan Udang di Kabupaten Cilacap Tahun 1969-1972.	55
3.2	Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Cilacap Tahun 1971-1980.	67
4.1	Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Cilacap Tahun 1980-1985.	97

DAFTAR TABEL

Tabel:	Halaman
2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 1969-1985.	27
2.2 Jumlah Angka Kelahiran dan Kematian Kabupaten Cilacap Tahun 1970-1985.	29
2.3 Banyaknya Kepala Keluarga (KK) dan Banyaknya Jiwa yang Bertransmigrasi dari Kabupaten Cilacap Tahun 1970-1985.	30
3.1 Realisasi Ekspor-Import Ikan 1938-1966 (1.000 Kg).	40
3.2 Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Cilacap Tahun 1965-1969.	42
3.3 Jenis Tenaga Penggerak Perahu/Kapal Nelayan di Cilacap Tahun 1970-1985.	49
3.4 Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Cilacap Tahun 1969-1971.	54
3.5 Jumlah Kapal Modern di Kabupaten Cilacap Tahun 1971-1973.	64
3.6 Jumlah produksi ikan di Kabupaten Cilacap Tahun 1971-1980.	65
4.1 Jumlah Produksi Ikan dan Udang di Kabupaten Cilacap pada Januari-September Tahun 1980.	72
4.2 Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Cilacap Tahun 1980-1985.	95
4.3 Perkembangan Industri Hasil Tangkap di Kabupaten Cilacap Sebelum dan Sesudah Dilarangnya Jaring <i>Trawl</i> .	97
4.4 Kondisi Tenaga Perkerja Setelah Dilarangnya Penggunaan Jaring <i>Trawl</i> tahun 1980/1981.	98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:		Halaman
A	SK Menteri Pertanian Nomor 609/KPTS/UM/9/1976 tentang Daerah Penangkapan Kapal Trawl Dasar	109
B	Keputusan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl	110
C	Peta Daerah Penangkapan Kapal Trawl Dasar	111

RINGKASAN

Skripsi yang berjudul “Perubahan Penggunaan Alat Tangkap Nelayan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kenelayanan di Kabupaten Cilacap Tahun 1971-1985” membahas mengenai modernisasi perikanan serta dampaknya terhadap hubungan antar nelayan di Kabupaten Cilacap. Untuk membahas hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan sosial-politik. Tahap-tahap dalam penelitian ini meliputi proses pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (analisis sumber), hingga penyusunan cerita dalam bentuk penulisan sejarah.

Penelitian ini meliputi dua hal, yaitu: 1. Perubahan teknologi nelayan dan 2. Permasalahan yang ditimbulkan akibat perubahan teknologi nelayan. Melalui program motorisasi perahu dan penggunaan alat-alat tangkap yang lebih modern, perkembangan sektor perikanan di Kabupaten Cilacap menunjukkan adanya hasil yang positif. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari jumlah produksi nelayan yang meningkat secara signifikan. Namun, sejalan dengan adanya peningkatan jumlah produksi perikanan di Kabupaten Cilacap, berlangsung juga berbagai ketegangan sosial di tengah-tengah masyarakat nelayan. Konflik antar kelompok-kelompok nelayan seringkali bermula dari kecemburuan terhadap hasil tangkap dan pelanggaran terhadap wilayah-wilayah penangkapan.

Hingga pada akhirnya penggunaan jaring *trawl* dilarang oleh pemerintah, timbullah berbagai permasalahan-permasalahan baru, khususnya yang berkaitan dengan proses perubahan alat tangkap menjadi *non-trawl*, penyaluran para buruh-buruh eks-kapal *trawl* dan buruh-buruh pabrik hingga adanya sebagian usaha-usaha yang bergerak dibidang perikanan terpaksa harus tutup akibat menurunnya produksi ikan yang biasa dipasok oleh nelayan-nelayan *trawl*.

SUMMARY

Thesis entitled "Changes in the Use of Fishermen's Fishing Equipment and Its Influence on Service Relations in Cilacap Regency 1971-1985" discusses the modernization of fisheries and their impact on the relationship between fishermen in Cilacap District. To discuss this, the authors use the method of historical research to obtain socio-political. The stages in this study include the process of collecting sources (heuristics), verification (source criticisms), interpretations (source analysis), to collecting stories in the form of historical acquisition.

This study include two things, namely: 1. Changes in fisherman technology and 2. Problems caused by changes in fisherman technology. Through boat motorization programs and the use of more modern fishing gear, the development of the fisheries sector in Cilacap District shows positive results. This amount can be seen from the amount of fisheries production which increased significantly. However, overcoming the increasing number of fisheries production in Cilacap District, various social discussions also took place in the midst of the fishing community. Conflict between groups to move stems from jealousy of the catch and against the area of capture.

Used eventually, using trawl issued by the government, there arises various new problems, specifically related to the process of changing fishing into non-trawling, channeling of ex-trawler workers and factory workers as a result of moving businesses in the field of moving fisheries must close the production of fish that is usually supplied by trawlers.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Indonesia merupakan sebuah Negara yang wilayahnya berupa kepulauan, terdiri dari 17 ribu pulau besar dan kecil yang membentang di khatulistiwa dari Bujur 95 Timur sampai Bujur 141 Timur dan dari Lintang 6 Utara sampai Lintang 11 Selatan. Luas wilayahnya kurang lebih 9 juta Km², terbagi atas 3 juta Km² daratan pulau-pulau, 3 juta Km² perairan laut kedaulatan (*sovereignty*) di antara dan di sekelilingi pulau-pulau itu, serta 3 juta Km² perairan laut yang mengelilingi laut kedaulatan itu sebagai sabuk selebar 200 mil laut dengan hak berdaulat (*sovereignty right*) atas sumber daya alamnya, baik di atas maupun di bawah permukaan dan di lapisan bawah dasar lautnya.¹

Selain itu, letak Indonesia juga sangat strategis, yaitu berada tepat digaris khatulistiwa dan dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Berdasarkan letak geografis tersebut, maka tidak mengherankan apabila Indonesia memiliki kekayaan berupa keragaman hayati laut yang tinggi atau disebut juga sebagai *mega diversity* di dunia.² Walaupun Indonesia disebut sebagai Negara maritim, desa-desa pesisir di Indonesia masih tergolong sebagai desa yang sebagian besar penduduknya berada dalam struktur perekonomian yang rendah.

Menurut Kusnadi, rendahnya tingkat perekonomian masyarakat pesisir setidaknya disebabkan karena dua faktor. Faktor *pertama* adalah faktor alamiah. Faktor alamiah ini tentu berkaitan dengan perubahan musim-musim penangkapan dan struktur alamiah sumber daya perekonomian desa. Faktor *kedua* adalah faktor non-alamiah. Faktor non-alamiah ini berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil, tidak

¹ Wahyono S. K, *Indonesia Negara Maritim* (Jakarta: Teraju, 2009), hlm. 1-2.

² Rilus A. Kinseng, *Konflik Nelayan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 3.

adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya penguasaan jaringan pemasaran, belum berfungsinya koperasi nelayan dengan baik, serta dampak negatif dari kebijakan modernisasi perikanan yang sudah berlangsung sejak setengah abad terakhir.³

Pembangunan pada sektor perikanan pasca kemerdekaan Indonesia sebenarnya sudah mulai dilakukan pada masa Kabinet Kerja IV Soekarno. Pada saat itu, pemerintah membentuk Departemen Perikanan Darat-Laut melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 141 tahun 1964 sebagai bentuk desentralisasi dari Departemen Pertanian dan Agraria. Namun, lahirnya departemen ini tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan sektor perikanan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena departemen ini hanya bekerja tidak lebih dari satu tahun, sehingga program-program yang telah dirumuskan tidak berjalan sebagai mana mestinya.⁴

Setelah runtuhnya kekuasaan Soekarno dari jabatannya sebagai Presiden pertama Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melalui TAP MPRS XXXIII tahun 1967 mengangkat Soeharto untuk menjabat dan menggantikan Soekarno sebagai Presiden Indonesia. Pada era yang baru ini, pembangunan sektor perikanan di Indonesia terlihat menuju pada masa depan yang baik. Walaupun secara kelembagaan pemerintahan Soeharto tidak membentuk satu instansi khusus yang berdiri sendiri untuk mengurus masalah-masalah di sektor perikanan, namun melalui kebijakan-kebijakannya pemerintahan Soeharto dianggap berhasil membawa dunia perikanan di Indonesia

³ Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan Dan Perebutan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2006), hlm. 1-5.

⁴ Sutejo K. Widodo, *Dinamika Kebijakan Terhadap Nelayan: Tinjauan Historis Pada Nelayan Pantai Utara Jawa, 1900-2000* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 24.

ke arah yang lebih baik, setidaknya untuk mengurangi ketergantungan impor ikan.⁵

Peningkatan volume hasil tangkap nelayan tentu tidak terlepas dari kebijakan atau usaha pemerintah dalam memodernisasi sektor perikanan dengan cara memotorisasi kapal-kapal nelayan serta mengganti alat tangkapnya yang semula menggunakan alat tangkap tradisional menjadi alat tangkap yang lebih modern. Hal ini tentu diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kehidupan nelayan. Hal tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kehidupan nelayan, sebab modernisasi selalu dikonotasikan sebagai sebuah perubahan kearah yang lebih baik.

Sebelum adanya perubahan teknologi perikanan, wilayah perairan di Indonesia dapat dikatakan masih dalam keadaan yang aman karena belum adanya dampak buruk yang dirasakan oleh nelayan-nelayan tradisional akibat adanya perubahan teknologi. Namun, setelah adanya perubahan alat tangkap, kondisi sosial-ekonomi nelayan-nelayan di Indonesia mengalami perubahan. Bukan hanya volume hasil tangkap yang meningkat secara signifikan, melainkan juga terjadinya kerusakan lingkungan hingga berujung pada konflik yang terjadi antar nelayan. Bahkan Conner Bailey berpendapat bahwa selama 30 tahun (1968-1997), perikanan pesisir di Asia Tenggara telah menjadi medan pertempuran antara nelayan tradisional dengan nelayan modern.⁶

Salah satu kasus yang berkaitan dengan pendapat tersebut adalah konflik nelayan yang terjadi di perairan Kabupaten Cilacap. Konflik antar nelayan di Kabupaten Cilacap ini merupakan salah satu rentetan kasus penting yang menyangkut perjuangan nelayan-nelayan tradisional dalam mempertahankan hak-

⁵ Syamsul Hadi, *Strategi Pembangunan Mahatir Dan Soeharto: Politik Industrialisasi Dan Modal Jepang Di Malaysia Dan Indonesia* (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2005), hlm. 159.

⁶ Conner Bailey, *Lesson From Indonesia's 1980 Trawler Ban*. Artikel terbit dalam *Jurnal Marine Policy* Volume 21, Nomor 3, Tahun 1997, hlm. 225.

haknya atas sumber daya perikanan sebagai salah satu usaha untuk menjaga kelangsungan hidup mereka.⁷

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu wilayah yang mengalami kemajuan dalam dunia perikanan seiring dengan adanya program modernisasi perikanan. Namun, sejalan dengan adanya peningkatan jumlah produksi perikanan di Kabupaten Cilacap, berlangsung juga berbagai ketegangan sosial di tengah-tengah masyarakat nelayan, khususnya antara nelayan-nelayan tradisional dengan nelayan-nelayan modern (*trawl*). Konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok nelayan seringkali bermula dari kecemburuan akibat hasil tangkap nelayan pendatang relatif lebih besar dari nelayan lokal.⁸ Selain itu, konflik juga sering terjadi akibat dilarangnya aturan-aturan yang berlaku oleh nelayan pendatang.

Konflik antar nelayan di Kabupaten Cilacap sudah terjadi sejak tahun 1977. Berdasarkan catatan dari berbagai surat kabar, selama kurun waktu 3 tahun (1977-1979) sudah terjadi 11 kali keributan antara nelayan tradisional dengan nelayan-nelayan *trawl*. Permasalahan yang belakangan ini sering terjadi menurut Bailey secara garis besar disebabkan oleh persoalan yang sama yaitu persaingan dalam memperebutkan sumber daya laut yang sama. Namun, konflik juga sering kali disebabkan karena adanya 'toleransi' dalam penegakan hukum, kuatnya penetrasi pemilik modal terhadap sumber daya perikanan, serta adanya perbedaan tingkat kecanggihan teknologi penangkapan yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan baik dalam hal kualitas maupun kuantitas produksi menjadi faktor-faktor pendorong terjadinya konflik antar nelayan.⁹

Berdasarkan kondisi tersebut, ketika ketimpangan terjadi, pelanggaran yang terkesan dilegalkan, dan Negara 'bolos' untuk melindungi yang rentan, serta tidak ada lagi yang berpihak pada nelayan tradisional, maka perlawanan atau

⁷ Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan*, hlm. 129.

⁸ Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan* (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 359-360.

⁹ Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan*, hlm. 129-132.

pemberontakan merupakan jalan keluar yang masuk akal bagi mereka untuk membebaskan diri dari sikap pesimis kepada sikap optimis dalam hidup. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa sejarah nelayan tradisional adalah sejarah kegagalan, sejarah hidup dengan hanya sedikit perlindungan, sejarah yang dengan sengaja seluruh sumber daya laut semakin menjauh dari jangkauan mereka, dan sejarah yang pelaku utamanya adalah kelas sosial atas.¹⁰

Permasalahan yang lahir akibat dari perkembangan teknologi ini dianggap menarik dan mendorong penulis untuk menelitinya. Skripsi yang berjudul *Perubahan Alat Tangkap Nelayan Tradisional dan Pengaruhnya Bagi Aktivitas Kenelayana di Kabupaten Cilacap Tahun 1970-1985* ini berangkat dari beberapa permasalahan yang dianggap menarik untuk dikaji. Pada umumnya, sebelum terjadinya perubahan teknologi penangkapan, nelayan-nelayan di Kabupaten Cilacap masih menggunakan teknologi tradisional. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tiga hal, yaitu perahu, alat tangkap, dan tenaga penggerak. Seiring berjalannya waktu, nelayan-nelayan di Kabupaten Cilacap mulai merubah alat kerjanya menjadi lebih modern dengan harapan dapat meningkatkan jumlah produksi yang selama ini tidak berkembang secara signifikan.

Namun, perubahan teknologi yang digunakan oleh para nelayan di Kabupaten Cilacap tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah produksi perikanan yang cukup signifikan, melainkan juga melahirkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aktifitas kenelayanan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas dua permasalahan, yaitu perubahan teknologi nelayan serta permasalahannya bagi aktifitas kenelayanan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan dipandu dengan pertanyaan penelitian agar penulis dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif. Adapun pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁰ Kata pengantar oleh Robert M.Z. Lawang dalam Rilis A. Kinseng, *Konflik Nelayan*, hlm. viii-ix.

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya perubahan teknologi perikanan di Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana dampak perubahan teknologi perikanan terhadap hubungan antar nelayan di Kabupaten Cilacap?
3. Bagaimana bentuk penyelesaian dari permasalahan yang ditimbulkan dari adanya modernisasi perikanan di Kabupaten Cilacap?

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian sejarah merupakan suatu proses pengkajian secara sistematis dari suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru serta makna dari peristiwa yang sedang dikaji. Penelitian sejarah juga harus dibatasi agar topik pembahasan yang akan dikaji tidak melebar dari topik yang sedang dibahas. Pendapat tersebut juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Taufik Abdullah, ia mengatakan bahwa pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah sangat diperlukan agar hasilnya dapat lebih fokus dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara empiris maupun metodologis.¹¹ Adapun pembatasan-pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah terbagi menjadi tiga, yaitu ruang lingkup spasial, ruang lingkup temporal, dan ruang lingkup keilmuan.

Pembatasan ruang lingkup yang pertama adalah ruang lingkup spasial, yaitu batasan yang didasarkan pada kesatuan wilayah geografis atau wilayah administratif tertentu.¹² Sebagai batasan ruang lingkup spasial, penelitian ini akan dilakukan di wilayah selatan Kabupaten Cilacap, tepatnya di wilayah pantai Teluk Penyupp. Wilayah pantai Teluk Penyupp dipilih sebagai batasan lingkup spasial karena wilayah ini merupakan salah satu basis perikanan di Jawa Tengah yang

¹¹ Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), hlm. 10.

¹² Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi Sejarah* (Semarang: Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, 2014), hlm. 19.

mengalami berbagai ketegangan-ketegangan sosial di antara kelompok-kelompok nelayan.¹³

Pembatasan ruang lingkup yang kedua adalah pembatasan ruang lingkup temporal, yaitu batasan waktu yang dipilih dalam suatu penelitian.¹⁴ Sebagai batasan waktu, penelitian ini akan memfokuskan pembahasan mulai dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1985. Alasan penentuan tahun 1970 sebagai batas waktu awal penelitian adalah karena pada tahun tersebut kapal-kapal modern yang dikenal dengan kapal Pukat Harimau atau kapal *trawl* mulai diperkenalkan dan beroperasi di wilayah perikanan Kabupaten Cilacap.¹⁵

Sebagai batas akhir waktu penelitian, penulis memilih tahun 1985. Tahun tersebut dipilih penulis sebagai batas akhir penelitian karena pada tahun tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 mengenai Perikanan. Berdasarkan hasil pertimbangan pemerintah, guna memanfaatkan potensi perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), perluasan kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan aturan hukum dan menetapkan ketentuan-ketentuan baru dalam bentuk Undang-undang.¹⁶

Pembatasan ruang lingkup yang terakhir adalah pembatasan ruang lingkup keilmuan, yaitu batasan terhadap aspek-aspek yang dianalisis.¹⁷ Ruang lingkup keilmuan ini diperlukan guna menunjang analisis dan argumentasi dalam penyusunan penelitian. Tulisan ini merupakan hasil penelitian sejarah sosial-ekonomi dengan fokus kajian mengenai perubahan teknologi nelayan serata

¹³ Conner Bailey, *Lessons From Indonesia's 1980 Trawler Ban*, hlm. 227.

¹⁴ Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi Sejarah*, hlm. 18.

¹⁵ Conner Bailey, *Lesson From Indonesia's 1980 Trawler Ban*, 227.

¹⁶ Lihat hasil pertimbangan huruf (a), (b), dan (c) pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

¹⁷ Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi Sejarah*, hlm. 20.

dampaknya bagi aktifitas kenelayanan. Perubahan teknologi nelayan yang diharapkan dapat membawa dampak baik, ternyata juga dapat menghasilkan permasalahan bagi kehidupan mereka, khususnya dalam aktifitas kenelayanan.

C. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa perubahan teknologi yang terjadi di Kabupaten Cilacap telah menghasilkan dampak yang baik dan dampak yang buruk. Dengan melakukan penelitian mengenai modernisasi perikanan, hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai modernisasi perikanan serta memberikan sumbangan kepada para pembaca yang budiman yang mungkin memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai seluk-beluk kehidupan masyarakat nelayan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan ruang lingkup yang telah disampaikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan penelitian, yaitu: *Pertama*, mengungkap faktor-faktor apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya perubahan teknologi yang digunakan oleh para nelayan di Kabupaten Cilacap. *Kedua*, mengetahui dampak-dampak yang dihasilkan dari adanya perubahan teknologi penangkapan yang digunakan oleh para nelayan di Kabupaten Cilacap. *Ketiga*, menjabarkan bentuk penyelesaian dari permasalahan yang timbul akibat perubahan teknologi nelayan di Kabupaten Cilacap.

D. Tinjauan Pustaka

Buku yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah salah satu buku karya dari Kusnadi yang berjudul "*Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber daya Alam*".¹⁸ Buku karya Kusnadi yang menjadi rujukan dalam penelitian ini merupakan berasal dari kumpulan dari makalah-makalah atau artikel ilmiah yang terpisah yang kemudian disusun kembali sehingga menjadi kesatuan pembahasan satu topik yang saling berkaitan.

¹⁸Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Alam* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2006).

Buku ini terdiri dari sepuluh judul pembahasan yang berpegang pada pendekatan aspek etnografis dan bersumber dari data lapangan yang kuat.

Walaupun wilayah kajian dalam buku ini di wilayah Jawa Timur, namun buku ini dapat menjadi rujukan atau pegangan para peneliti dalam mengkaji persoalan nelayan khususnya yang berkaitan dengan dampak dari modernisasi. Isu utama yang sering dibahas dalam kehidupan nelayan adalah isu kemiskinan. Menurut Kusnadi, kemiskinan yang dialami oleh nelayan berasal dari dua faktor yaitu faktor alamiah dan faktor non alamiah.

Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alamiah biasanya berkaitan dengan perubahan musim-musim penangkapan sumber daya perikanan serta struktur alamiah sumber daya ekonomi desa. Sedangkan faktor non alamiah yang menjadi akar kemiskinan nelayan adalah masalah keterbatasan penguasaan teknologi penangkapan, perbedaan sistem bagi hasil, tidak terjangkaunya jaminan sosial, lebahnya jaringan terhadap pasar, belum berfungsinya koperasi nelayan, serta dampak negatif dari adanya program modernisasi perikanan.

Buku ini dipilih sebagai tinjauan pustaka karena buku ini dinilai memiliki relevansi dengan topik yang sedang dikaji, yaitu mengenai modernisasi dan dampaknya terhadap kehidupan nelayan di Kabupaten Cilacap. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu judul pembahasan yang disajikan oleh Kusnadi, yaitu mengenai kasus Cilacap dan pengakuan hak atas sumber daya perikanan.

Pada tulisannya tersebut, Kusnadi membahas mengenai beberapa aspek yang menyebabkan terjadinya konflik antar nelayan di Kabupaten Cilacap. Menurut pendapatnya, konflik yang terjadi di Kabupaten Cilacap disebabkan karena tiga hal, yaitu karena tidak adanya penegakkan hukum yang diterapkan oleh aparat negara kepada setiap kasus-kasus pelanggaran, adanya penetrasi ekonomi yang tinggi oleh pemilik modal, serta perbedaan tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan.

Selain itu, buku ini juga membahas mengenai dampak dari modernisasi perikanan. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh nelayan tradisional dalam memproduksi sumber daya perikanan tidak hanya dipengaruhi oleh beberapa faktor di atas, tetapi juga dipengaruhi oleh dampak dari modernisasi perikanan.

Penetrasi ekonomi yang tinggi dari pemilik modal memaksa para pekerjanya untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan sumber daya perikanan. Hasilnya, untuk memuaskan hasrat agar mendapatkan keuntungan yang maksimal, kalkulasi mengenai kelestarian sumber daya laut menjadi masalah bagi nelayan-nelayan tradisional.

Tinjauan pustaka selanjutnya adalah hasil laporan dari Syafril Fauzi yang berjudul "*Trawl, Perkembangan dan Permasalahannya di Indonesia*".¹⁹ Berdasarkan hasil laporan ini, Syafril mengemukakan mengenai sejarah perjalanan penggunaan jaring *trawl* di Indonesia. Karya ilmiah ini penulis gunakan sebagai tinjauan pustaka karena menurut hemat penulis, hasil penelitian yang dikemukakan oleh Syafril memiliki relevansi dengan pembahasan yang sedang penulis kaji, khususnya materi yang akan penulis bahas pada Bab 3.

Berdasarkan hasil penelitian Syafril, percobaan pengoperasian jaring *trawl* di Indonesia sebenarnya sudah dimulai tahun 1907 oleh orang berkebangsaan Belanda bernama A.M. Von Roosendal, namun percobaan tersebut tidak memberikan hasil yang baik. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1950, percobaan penggunaan jaring *trawl* kembali dilakukan oleh Jawatan Perikanan Laut dengan bimbingan E. Schol, seorang ahli *trawl* yang berasal dari Belanda. Percobaan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi tujuan pemerintah dalam memajukan taraf hidup masyarakat nelayan.

Pada tahun 1957, T.H. Butler, seorang ahli dari FAO melakukan percobaan penangkapan udang dengan menggunakan jaring *trawl*. Percobaan tersebut dilakukan dalam waktu satu bulan dengan melakukan 36 kali percobaan di daerah antara Balikpapan dan Kota Baru yang memiliki kedalaman antara 5-25 meter. Hasil percobaan tersebut cukup memuaskan karena dalam waktu satu jam percobaan dapat menghasilkan 100 Kg udang dengan kualitas terbaik.

¹⁹ Syafril Fauzi, *Trawl, Perkembangan dan Permasalahannya di Indonesia*. Skripsi (Bogor: Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor, 1981).

Pada tahun 1966, di wilayah perairan bagan Siapi-api, pengoperasian jaring *trawl* sudah digunakan secara komersial dengan menggunakan kapal motor yang berukuran 25 GT dan dikenal dengan kapal motor tipe Bagan Siapi-api. Keberhasilan penggunaan jaring *trawl* ditambah dengan besarnya arus modal yang masuk ke sektor perikanan Indonesia berdampak pada ekspor hasil perikanan yang berkembang dengan pesat.

Pada tahun 1973, alat tangkap moderen di Indonesia dinyatakan telah berkembang. Unit penangkapan pada tahun tersebut sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Penggunaan jaring *trawl* di Pulau Sumatera sendiri berjenis *otter trawl* yang jumlahnya mencapai 99,40% dan sisanya adalah jenis *trawl* lainnya, sedangkan di Pulau Jawa, jumlah penggunaan jaring *otter trawl* mencapai 99,32% dan sisanya adalah *trawl* udang ganda. Kemudian di Pulau Kalimantan terdiri dari 99,50% jenis *otter trawl* dan sisanya adalah *trawl* udang ganda.

Satu tahun kemudian, alat-alat penangkapan modern ditingkatkan jumlah unitnya. Peningkatan jumlah unit sangat dirasakan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Peningkatan unit di Pulau Sumatera pada 1973-1974 sebesar 18,80% sedangkan di Pulau Jawa peningkatannya mencapai 16,20%. Meningkatnya jumlah unit kapal yang menggunakan jaring *trawl* tentu berdampak pada hasil produksi perikanan. Namun, sejalan dengan peningkatan hasil produksi perikanan, juga terjadi berbagai persaingan antar nelayan yang berujung pada konflik nelayan. Menurut Syafril, konflik yang timbul antara nelayan tradisional dan nelayan *trawl* tipe Bagan Siapi-api bukan disebabkan karena adanya “penolakan kultural” melainkan karena adanya “konsekuensi struktural”.

Setelah berbagai ketegangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat nelayan, mendorong pemerintah untuk meregulasi pengoperasian kapal-kapal *trawl*. Maka dari itu lahirlah SK Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/Um/75 mengenai pembinaan kelestarian yang terdapat dalam sumber daya perikanan Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan SK Menteri Pertanian Nomor 607/Kpts/Um/9/76 mengenai jalur-jalur penangkapan ikan, SK Menteri Pertanian Nomor 608/Kpts/Um/9/76 mengenai penetapan jalur penangkapan bagi kapal-

kapal perusahaan-perusahaan perikanan Negara, dan SK Menteri Pertanian Nomor 609/Kpts/Um/9/76 mengenai dasar penangkapan kapal *trawl* dasar hingga berujung pada pelarangan penggunaan jaring *trawl* melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 mengenai penghapusan jaring *trawl* yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1980.

Sumber terakhir yang akan penulis gunakan sebagai tinjauan pustaka adalah karya ilmiah dari Holomon Tamba yang berjudul "*Studi Pendahuluan Pendapatan Nelayan Non -Trawl dan Mobilisasi Tenaga Kerja Setelah Penghapusan Trawl (Studi Kasus di Cilacap Jawa-Tengah)*".²⁰ Penelitian Holomon yang membahas mengenai kondisi perikanan di Kabupaten Cilacap setelah dilarangnya penggunaan jaring *trawl* oleh pemerintah melalui Keppres No.39 Tahun 1980 ini penulis nilai memiliki relevansi dengan tema yang sedang dibahas, khususnya dapat digunakan pada Bab 4 yaitu pembahasan mengenai kondisi perikanan di Kabupaten Cilacap setelah pelarangan penggunaan jaring *trawl*.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Holomon menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi perikanan di Kabupaten Cilacap setelah dilarangnya penggunaan jaring *trawl* oleh pemerintah melalui Keppres 39/80. Hal tersebut antara lain seperti jumlah produksi, frekuensi *trip* perahu nelayan, harga komoditas hasil laut, sistem bagi hasil, hingga mobilitas para nelayan pasca dilarangnya jaring *trawl*.

Mengenai jumlah produksi, Holomon mengatakan bahwa pasca dilarangnya penggunaan jaring *trawl*, jumlah produksi hasil laut yang didapat oleh para nelayan mengalami peningkatan. Kondisi tersebut disebabkan karena meningkatnya jumlah perahu nelayan yang menggunakan mesin bermotor. Peningkatan jumlah pengguna mesin bermotor sebagai tenaga penggerak perahunya menyebabkan semakin tingginya frekuensi per *trip* para nelayan. Jumlah perahu nelayan tradisional yang aktif pada tahun 1980 (sebelum

²⁰ Holomon Tamba, *Studi Pendahuluan Pendapatan Nelayan Non -Trawl dan Mobilisasi Tenaga Kerja Setelah Penghapusan Trawl (Studi Kasus di Cilacap Jawa-Tengah)*, (Bogor: IPB fakultas Perikanan, 1981).

penghapusan *trawl*) adalah sebanyak 719 unit perahu dengan rata-rata *trip* per hari 54 unit perahu. Namun, pada tahun 1980/1981 (setelah penghapusan *trawl*) jumlah perahu yang aktif meningkat sebanyak 880 unit perahu dengan rata-rata *trip* per hari sebanyak 168 unit perahu. Jumlah perahu yang aktif dan *trip* per hari yang mengalami peningkatan tentu berdampak pada jumlah produksi dan pendapatan nelayan.

Berdasarkan hasil penelitiannya, peningkatan harga jual dari komoditas yang berhasil mereka dapatkan ada sebanyak 108,1 % (udang) dan 8,3 % (ikan). Sebelum penghapusan penggunaan jaring *trawl* (1997), harga udang dan ikan masing-masing rata-rata hanya seharga Rp. 1.355/ Ke (udang) dan Rp. 132/Kg (Ikan). Pada tahun 1980 (Januari-September), masing-masing rata-rata harganya sebesar Rp. 1.100/Kg (udang) dan Rp. 181/Kg (Ikan). Namun, setelah penghapusan jaring *trawl* (Oktober 1980-Mei 1981), masing-masing rata-rata adalah sebesar Rp. 2289/Kg (udang) dan Rp. 196/Kg (ikan). Dengan kata lain, setelah penghapusan jaring *trawl*, harga udang dan ikan mengalami peningkatan sebesar 108,1% dan 8,3% dari harga produksi pada tahun 1980 (sebelum penghapusan *trawl*).

Pembahasan dari penelitian Holomon selanjutnya yang menurut penulis memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah mengenai mobilitas tenaga kerja setelah *trawl* dilarang. Berdasarkan hasil penelitiannya, setelah penggunaan jaring *trawl* dilarang penggunaannya di Kabupaten Cilacap, mobilitas tenaga kerja lebih besar dari sebelumnya. Mobilitas sebelum *trawl* dilarang (Mei-Desember 1979) rata-rata sebesar 18.778 orang/bulan atau 611 orang/hari. Pada tahun 1980 (Januari-September), angkanya semakin berkurang yaitu sebanyak 12.242 orang/bulan atau 369 orang/hari. Namun, mobilitas tenaga kerja setelah *trawl* dilarang adalah sebanyak 25.501 orang/bulan atau rata-rata 839 orang/hari. Hal ini menunjukkan bahwa penghapusan penggunaan jaring *trawl* telah membawa peningkatan mobilitas tenaga kerja sebesar 37,3% dari mobilitas tenaga kerja/hari pada tahun 1979 menjadi sebesar 127,4% mobilitas tenaga kerja /hari pada tahun 1980.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian yang berjudul *Perubahan Alat Tangkap Nelayan Tradisional dan Pengaruhnya Bagi Aktivitas Kenelayana di Kabupaten Cilacap Tahun 1970-1985* ini akan membahas mengenai modernisasi perikanan serta dampaknya terhadap kehidupan nelayan di Kabupaten Cilacap. Pada konteks pembangunan perikanan di Indonesia, modernisasi perikanan pada masyarakat nelayan merupakan bagian dari program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sejak awal program Pembangunan Lima Tahun (PELITA) ke-I pada tahun 1969/1970 hingga saat ini. Modernisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perubahan orientasi dalam metode penangkapan yang dilakukan oleh para nelayan, yang semula berorientasi pada metode penangkapan tradisional kemudian berubah menjadi metode penangkapan yang lebih modern

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah modernisasi diartikan sebagai suatu proses penyesuaian sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntunan masa kini, termasuk pada metode dalam memproduksi sumber daya perikanan yang selalu mengalami modifikasi sesuai tuntunan zaman. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, modernisasi adalah suatu bentuk perubahan yang terjadi karena adanya perubahan sosial yang terarah pada suatu perencanaan.²¹

Rencana dalam memodernisasi perikanan di Indonesia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu modernisasi berdasarkan aspek fisik dan modernisasi berdasarkan aspek ekonomi. Modernisasi berdasarkan aspek fisik merupakan suatu usaha dalam mengubah alat kerja yang semula tradisional menjadi lebih modern. Pada aspek ini, alat kerja yang dimaksud merupakan alat tangkap ikan dan tenaga penggerak kapal. Sedangkan pengertian modernisasi berdasarkan aspek ekonomi adalah sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan, kemampuan dan kesejahteraan para nelayan.²² Kedua konsep tersebut merupakan suatu entitas

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Bandung: CV Rajawali, 1987), hlm. 358.

²² “Usaha Memodernisasi Harus Memperhatikan Kebutuhan Nelayan”, *Kompas*, 27 Juli 1976.

yang saling berhubungan satu sama lain karena usaha memodernisasi perikanan secara fisik niscaya akan memberikan dampak para perekonomian para nelayan.

Untuk dapat mewujudkan cita-cita menjadikan sektor perikanan yang modern, maka dilakukan usaha motorisasi kapal-kapal nelayan serta mendorong mereka untuk mengubah alat tangkapnya dengan alat yang lebih modern. Istilah motorisasi menurut KBBI adalah sebagai sebuah perubahan suatu yang semula tidak menggunakan motor menjadi bermotor atau pemakaian motor sebagai tenaga penggerak.²³ Usaha untuk memotorisasi kapal-kapal nelayan sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan yang pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan perekonomian para nelayan.²⁴

Usaha untuk memotorisasi kapal-kapal tersebut didasarkan pada Instruksi Direktorat Djendral Perikanan Nomor H.I/4/5/15/1971 setelah adanya laporan bahwa kenaikan jumlah kapal motor nelayan belum menunjukkan adanya hasil yang cukup memuaskan. Sampai dengan tahun 1970, jumlah kapal bermotor hanya mendekati 6.000 unit kapal yang sebagian besar merupakan kapal motor berukuran kecil, sedangkan jumlah seluruh kapal perikanan yang ada di Indonesia adalah 250.000 unit kapal, atau dengan kata lain hanya 2,4% jumlah kapal-kapal nelayan yang sudah dilengkapi dengan mesin bermotor sebagai tenaga penggerak.²⁵

Sejalan dengan fakta tersebut, sampai pada tahun 1973, kapal-kapal nelayan di Kabupaten Cilacap yang sudah menggunakan mesin bermotor berjumlah hanya mencapai 112 unit kapal dari total kapal perikanan yang berjumlah 513 unit kapal. Dengan kata lain, usaha untuk memotorisasi kapal-kapal nelayan di Kabupaten Cilacap sampai tahun 1973 hanya mencapai 28% unit

²³ Tim Penyusunan Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 756.

²⁴ Azizah Mahari, *Peranan Perikanan Dalam Mendukung Perekonomian Indonesia*. Jurnal Kultura Volume 16 Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 5476.

²⁵ Sutejo K. Widodo, *Ikan Layang Terbang Menjulung* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 142.

kapal.²⁶ Rendahnya persentase kapal-kapal bermotor di Kabupaten Cilacap disebabkan karena tidak semua nelayan dapat menikmati proses motorisasi kapal-kapal mereka. Motorisasi kapal perikanan ternyata hanya mampu menjangkau sebagian nelayan dan para pengusaha perikanan dengan modal yang besar.

Kondisi tersebut akan memiliki dampak terjadinya suatu perubahan sosial dalam dimensi struktur, kultur, dan interaksional di tengah masyarakat.²⁷ Perubahan dalam satu dimensi tentu akan memiliki pengaruh pada dimensi yang lainnya. Praktik mekanisasi yang tidak tepat sasaran tentu akan menyebabkan lahirnya diversifikasi kelompok nelayan. Nelayan sebagai suatu entitas terpolarisasi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok nelayan kecil/tradisional dan nelayan besar/modern. Sebagai batasan, yang dimaksud dengan nelayan tradisional dan nelayan modern dibedakan berdasarkan jenis perahu atau kapalnya. Menurut Bailey dan Dwiponggo, semua kapal yang ditenagai oleh layar atau mesin tempel didefinisikan sebagai kapal berskala kecil/tradisional, sedangkan kapal bermesin disel (*inboard*) didefinisikan sebagai kapal berskala besar/modern.²⁸

Lahirnya dua kelompok nelayan yang berbeda tentu akan menimbulkan berbagai macam persaingan. Persaingan dinilai baik selama memiliki tujuan untuk mencari mana yang lebih baik dan unggul dengan cara yang adil serta tidak menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Namun, dalam kasus perebutan sumber daya perikanan di Kabupaten Cilacap, persaingan justru sering menimbulkan berbagai keresahan dan ketegangan akibat adanya pelanggaran jalur penangkapan, tidak adanya penegakkan hukum, hingga kerusakan lingkungan akibat persaingan tersebut.

²⁶ Statistik Kabupaten Daerah TK: II Cilacap, Tahun 1973, hlm. 144.

²⁷ Sunardi, *Mencermati Dimensi-dimensi Perubahan Sosial Pada Masyarakat Pedesaan*. Kata pengantar dalam Kurnadi Shahab, *Sosiologi Pedesaan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 20-21.

²⁸ Conner Bailey, dkk. *Indonesian Marine Capture Fisheries* (Philippines: ICIARM, 1987), hlm. 64.

Seperti yang telah diutarakan oleh Bailey (1997) bahwa persaingan antar kelompok nelayan telah menyebabkan terjadinya konflik.²⁹ Menurut Weber (1968) dalam Sabian (2007:15) mengatakan bahwa konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena struktur masyarakat yang beragam memiliki berbagai kepentingan. Keseragaman kepentingan inilah yang menurut Deutch (1973) ketika saling bertentangan satu sama lainnya akan melahirkan suatu konflik. Pertentangan tersebut dapat berupa sebuah bentuk tindakan yang bersifat mencegah, menghalangi, menghalangi, mencampuri, menyakiti, atau membuat tindakan atau aktifitas seseorang menjadi tidak berarti atau kurang efektif.³⁰

Suatu konflik yang terjadi di tengah masyarakat sangat erat hubungannya dengan kekerasan, hal tersebut dapat terjadi apabila suatu konflik sudah menimbulkan banyak korban dan terus berkelanjutan.³¹ Selain itu kekerasan juga dapat terjadi apabila terdapat potensi yang tidak dapat diaktualisasikan ke dalam tanah publik seperti adanya kesenjangan antara yang potensial dan yang aktual.³²

Jika dilihat berdasarkan prakteknya, kekerasan yang terjadi dapat dilakukan secara individu juga dapat dilakukan secara kolektif. Menurut Tilly (1966) dalam Nitibaskara (2001) dalam Sabian (2007) membedakan kekerasan kolektif ke dalam tiga kategori, yaitu *pertama* “kekerasan kolektif primitif” yang pada umumnya bersifat non politis, *kedua* “kekerasan kolektif reaksionir” yang pada umumnya merupakan reaksi kepada penguasa, dan *ketiga* yang pada

²⁹ Bailey, *Lesson from Indonesia's 1980 Trawler Ban*(Marine Pilot, Vol. 21, No. 3, 1997), hlm. 225.

³⁰ Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solideritas Masyarakat Nelayan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 15-16.

³¹ Ikhsan Malik, *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), hlm. 50.

³² Sabian Utsman, *Anatomi Konflik...*, hlm. 19.

umumnya adalah suatu tindakan kekerasan yang memiliki tujuan ekonomis dan politis.³³

F. Metode Penelitian

Mengenai metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu berdasarkan data yang diperoleh.³⁴ Selain itu, dalam proses merekonstruksi peristiwa sejarah, Kuntowijoyo (1995) berpendapat bahwa dalam melakukan penelitian sejarah, sejarawan harus melalui lima langkah hingga pada akhirnya berhasil dalam melakukan reonstruksi suatu peristiwa sejarah.³⁵ Adapun langkah-langkah tersebut adalah (1) Pemilihan Topik, (2) Pengumpulan sumber (heuristik), (3) verifikasi (kritik sumber), (4) Interpretasi (analisis sumber), dan (5) Penulisan.

Pada langkah pertama, penulis memilih topik mengenai modernisasi dan perlawanan nelayan. Topik ini dipilih karena berdasarkan hasil pengamatan, modernisasi bukan hanya mendatangkan dampak positif, melainkan juga berbagai permasalahan yang berujung pada konflik antar nelayan. Selain itu, alasan subjektif pemilihan topik tersebut karena konflik antar nelayan di Kabupaten Cilacap merupakan suatu topik yang menarik untuk diteliti disamping bahwa Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro memiliki kajian khusus mengenai sejarah kemaritiman di Indonesia.

Langkah selanjutnya adalah proses heuristik atau sering juga disebut sebagai proses penelusuran sumber. Heuristik merupakan keterampilan untuk mengumpulkan sumber.³⁶ Pada penelitian ini, sumber-sumber yang akan digunakan adalah sumber-sumber tertulis seperti buku, skripsi, jurnal, surat kabar,

³³ Sabian Utsman, *Anatomi Konflik...*, hlm. 24-25.

³⁴ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 39.

³⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 1995), hlm.90.

³⁶ Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Sejarah*, hlm. 26.

dan laporan penelitian yang relevan dengan topik yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Pengumpulan sumber tertulis dilakukan dengan menelusuri surat-surat kabar yang memuat masalah yang berkaitan dengan kehidupan nelayan di Kabupaten Cilacap selama tahun 1971-1985, literatur atau hasil penelitian di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI), serta buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian di Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS).

Selain sumber-sumber tertulis, untuk mendukung data-data yang telah dikumpulkan dari studi pustaka agar hasil penelitian lebih komprehensif, penulis juga melengkapi data-data tersebut dengan sumber-sumber lisan berupa wawancara dengan beberapa narasumber yang dinilai memiliki kompetensi atau pernah bersentuhan langsung dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi topik penelitian. Penulis juga mewawancarai kedua kelompok nelayan yang seringkali bersinggungan, yaitu nelayan dari Sintolokawat yang merupakan nelayan tradisional dan nelayan dari Maos yang merupakan mantan nelayan *trawl*.

Langkah selanjutnya setelah sumber-sumber berhasil terkumpul adalah melakukan verifikasi sumber, yaitu proses untuk menilai keaslian sumber baik secara eksternal maupun internal.³⁷ Pada proses verifikasi ini, terdapat dua macam tahap yang akan dilakukan, yaitu:

1. Memeriksa keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik eksternal. Kritik eksternal dilakukan untuk menguji bagian fisik sumber yang didapatkan dan keakuratan sumber; asli atau tidak. Pada proses ini, penulis hanya memeriksa sumber yang didapatkan dari hasil studi pustaka berupa surat kabar, peraturan atau surat-surat pemerintah, serta data-data statistik.
2. Memeriksa keabsahan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern. Pada tahap ini, penulis membandingkan satu sumber yang dimiliki dengan sumber lainnya untuk mencari data yang lebih akurat dan ditambah

³⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 100-101.

dengan kesaksian-kesian para informan. Pada tahap ini sumber yang diverifikasi biasanya berupa surat-surat kabar dan data statistik.

Langkah keempat setelah dilakukannya verifikasi sumber adalah interpretasi sumber (analisis data). Menurut Kuntowijoyo, interpretasi merupakan suatu proses menafsirkan sumber atau data yang telah didapat. Pada tahap ini, data atau sumber yang telah didapat akan ditelaah atau ditafsirkan isi atau substansi dari data tersebut. Mengenai proses ini, Kuntowijoyo mengatakan bahwa tahap ini merupakan tahap yang menjadi penyebab kesubjektifitasan para sejarawan. Namun, sebagai sejarawan yang jujur, data yang dicantumkan sebagai sumber haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara moral.³⁸

Tahap terakhir dari rangkaian penelitian ini adalah tahap penulisan (historiografi). Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau laporan hasil penelitian sejarah.³⁹ Pada penelitian sejarah, aspek kronologis merupakan salah satu aspek terpenting karena salah satu ciri utama dalam penulisan sejarah adalah siftanya yang kronologis.⁴⁰ Berbeda dengan kajian-kajian sosiologis yang tidak mengutamakan masalah waktu karena kajian-kajiannya yang terlalu kontemporer.

G. **Sistematika Penulisan**

Sebagai upaya untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang masing-masing babnya dianggap saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Berdasarkan beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian yang berjudul *Modernisasi: Persaingan dan Perlawanan Nelayan Tradisional di Kabupaten Cilacap Tahun 1971-1985* ini akan dibahas secara deskriptif analitis ke dalam

³⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 101.

³⁹ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 117.

⁴⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 104.

lima bab yang masing-masing babnya dianggap saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya.

Pembahasan pada **BAB I** adalah berupa rangkaian pemaparan mengenai latar belakang permasalahan serta tujuan penulis dalam mengangkat topik penelitian mengenai persaingan dan perlawanan nelayan tradisional di Kabupaten Cilacap. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai ruang lingkup atau batasan-batasan dalam penelitian yang didalamnya termasuk waktu, tempat dan batasan keilmuan. Selain itu kerangka pemikiran, tinjauan pustaka dan metode penelitian juga tidak luput penulis paparkan sebagai gambaran umum terhadap konsep serta langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Pembahasan pada **BAB II** adalah pembahasan mengenai gambaran umum mengenai kondisi geografis serta kondisi demografis masyarakat di Kabupaten Cilacap. Pada bab ini, penulis juga akan menjelaskan mengenai kehidupan serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Kabupaten Cilacap. Menurut penulis, pemaparan secara umum mengenai kondisi geografis serta kondisi demografis masyarakat di Kabupaten Cilacap, khususnya nelayan, dianggap penting. Hal tersebut disebabkan karena objek yang dikaji dalam penelitian ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat serta kondisi alam sebagai penunjang dari kehidupan mereka.

Pembahasan pada **BAB III** adalah bagian pertama dari inti pembahasan yang sedang dikaji. Pembahasan pada bab ini adalah pembahasan mengenai perkembangan alat tangkap nelayan. Sebelum hadirnya nelayan-nelayan *trawl*, proses dalam memproduksi sumberdaya perikanan di Kabupaten Cilacap didominasi oleh nelayan-nelayan yang masih menggunakan metode-metode tradisional. Namun, setelah adanya program untuk memodernisasi di sektor perikanan dan diperkenalkannya teknologi-teknologi penangkapan yang lebih modern, proses dalam memproduksi sumberdaya perikanan perlahan mengalami perubahan. Pada bab ini juga akan di telusuri faktor-faktor yang menyebabkan perubahan metode penangkapan dari metode tradisional menjadi metode penangkapan modern hingga dampak positif dari perubahan tersebut.

Sedangkan pembahasan pada **BAB IV** merupakan pemaparan berbagai permasalahan yang dihasilkan karena adanya perubahan teknologi atau metode penangkapan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa modernisasi yang terjadi di Kabupaten Cilacap hanya menyasar sebagian kelompok nelayan. Hasilnya adalah persaingan yang tidak seimbang antar nelayan sehingga berujung pada tindakan-tindakan kekerasan. Maka dari itu, pembahasan pada bab ini akan difokuskan pada pembahasan mengenai perbedaan hasil tangkap, pelanggaran jalur penangkapan hingga konflik antar nelayan. Selain itu, pada bab ini juga akan diuraikan mengenai peran pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan tersebut.

Pembahasan pada **BAB V** merupakan bab simpulan yang akan menarik benang merah berdasarkan pembahasan-pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Sehingga diharapkan dapat menjadi satu kesatuan yang dapat memberikan cerita sejarah yang kronologis dan diakronis.